



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur tentang pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Pemberlakuan otonomi daerah telah memberikan pemerintah daerah peluang yang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, dana maupun kekayaan lainnya. Pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, disebut sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. BPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. Salah satu fungsi dari BPKD adalah menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mekanisme penyusunan APBD dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu: tahap perencanaan dan tahap penganggaran (Halim:2007). BPKD berperan pada tahap penganggaran dimana setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selesai dibuat oleh Bappeda selanjutnya data RKPD ditarik untuk dimasukkan ke dalam proses KUA-PPAS yang akan dikerjakan oleh BPKD. Penganggaran dilakukan sebagai bentuk komunikasi atas harapan/sasaran baik pada instansi pemerintahan maupun perusahaan komersial kepada pihak-pihak terkait. Pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan transparansi kepada publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba mewujudkan unsur *transparansi* tersebut melalui *e-budgeting* yang dimulai pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun anggaran 2014. Pada penerapannya *e-budgeting* sudah sangat baik karena dapat mengurangi potensi kerugian dalam pengelolaan APBD, namun sistem *e-budgeting* masih memiliki kekurangan yaitu masih mengandalkan kemampuan manusia dan tidak bisa mendeteksi secara otomatis penginputan yang salah seperti yang terjadi pada rancangan APBD 2020.

Karena itu aplikasi *Smart Planning Budgeting* dirancang untuk menggantikan aplikasi *e-budgeting* yang masih belum maksimal penggunaannya. Aplikasi sistem *Smart Planning Budgeting* atau yang disingkat SPB dibangun untuk mengakomodir proses perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) di lingkungan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi SPB ini juga merupakan penyempurnaan sistem e-budgeting yang telah digunakan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis laporan tugas akhir dengan judul “Penerapan Aplikasi *Smart Planning Budgeting* pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan penggunaan aplikasi *Smart Planning Budgeting* pada BPKD Provinsi DKI Jakarta
2. Bagaimana proses bisnis TAPD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
3. Bagaimana proses diagram alir data yang terjadi pada BPKD Provinsi DKI Jakarta
4. Bagaimana penerapan aplikasi *Smart Planning Budgeting* pada BPKD Provinsi DKI Jakarta
5. Apa saja manfaat dan kendala dari penerapan aplikasi *Smart Planning Budgeting* pada BPKD Provinsi DKI Jakarta

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan terkait alasan penggunaan aplikasi *Smart Planning Budgeting* pada BPKD Provinsi DKI Jakarta
2. Menguraikan proses bisnis TAPD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
3. Menguraikan proses diagram alir data yang terjadi pada BPKD Provinsi DKI Jakarta
4. Untuk memaparkan bagaimana penerapan aplikasi *Smart Planning Budgeting* pada BPKD Provinsi DKI Jakarta
5. Menguraikan manfaat dan kendala dari penerapan aplikasi *Smart Planning Budgeting* pada BPKD Provinsi DKI Jakarta



1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Laporan Tugas Akhir ini digunakan sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh penulis selama menempuh studi, khususnya dalam penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kegiatan suatu perusahaan. Selain itu, laporan ini juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk evaluasi dengan melihat sejauh mana mahasiswa menguasai teori sistem informasi akuntansi yang telah diberikan, serta sebagai tambahan referensi di perpustakaan Sekolah Vokasi IPB terkait penulisan Tugas Akhir.

2. Secara Praktisi

Diharapkan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang dan menjadi masukan untuk kelancaran perusahaan.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies